

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Solopos
Media Online

Wilayah: Kabupaten Sragen

Halaman 16

Pandemi, Pajak Daerah 2020 Anjlok Rp14 Miliar

TRI RAHAYU

SRAGEN—Pendapatan asli daerah (PAD) Sragen terutama dari sektor pajak daerah menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat berkunjung ke Sragen, Kamis (25/3/2021). Pajak daerah di Sragen selama pandemi Covid-19 atau selama 2020 turun bila dibandingkan 2019.

Berdasarkan data yang dipaparkan Direktur Koordinasi dan Supervisi III KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama di Gedung Citrayasa Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Sragen, jumlah pajak daerah pada 2019 senilai Rp125.444.617.676. Angka pajak daerah tersebut turun di 2020 menjadi Rp111.442.618.797 sehingga turun senilai Rp14.001.998.879 atau 13%.

“Sragen pajaknya turun di 2020. Maklum, pandemi. Itu bagi orang waras, otaknya sehat, karena faktanya ada. Tetapi bagi otak kriminal justru menjadi kesempatan dengan adanya pemakluman. Seperti WFH [*work from home*] itu yakin bekerja di rumah maksimal? Banyak yang tidak maksimal karena dimaklumi,” ujar Bahtiar saat memberi pengarahan kepada Bupati, pimpinan daerah, dan pimpinan satuan kerja perangkat

daerah (SKPD) lainnya.

Dia menyebut senilai PAD Sragen Rp333 miliar dari total APBD Rp2,1 triliun. Dia mengatakan pajak di pusat berkurang sehingga penerimaan di daerah juga berkurang. Oleh karenanya, Bahtiar mendorong pemerintah daerah ketika melakukan perencanaan anggaran harus memiliki daya ungkit untuk kepentingan masyarakat banyak. Dia melarang anggaran daerah demi prestise tetapi tidak bisa dimanfaatkan masyarakat.

“Misalnya membangun stadion dengan biaya mahal tetapi kemudian ditelantarkan. Tidak semua kepala daerah memiliki sumber daya yang banyak. Kondisi itu berpotensi terjadi pesanan, rekanan berpolitik, yang berpengaruh pada kebijakan anggaran. Dalam hal penganggaran kami akan lihat apakah sudah sesuai dengan usulan dari desa dan kecamatan,” ujarnya.

Bahtiar menerangkan potensi kebocoran PAD bisa terjadi saat pengumpulan pendapatan seolah-olah capaiannya mencapai target padahal potensi pendapatan lebih besar daripada target. “Mestinya potensi pendapatan daerah itu dihitung ulang, idealnya berapa, sehingga PAD lebih optimal,” katanya.

Asisten III Sekretaris Daerah Sragen, Simon Nugroho, saat ditemui wartawan mengatakan mengatakan pajak daerah turun karena pendapatan dari sektor pariwisata, kuliner, hotel, berkurang drastis. Dia mengatakan objek wisata di Sragen tutup dan pengunjung rumah makan dan hotel turun di bawah 50%. “Untuk pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan retribusi tidak terpengaruh pandemi,” ujarnya.

Simon mengapresiasi sistem *cash management system* (CMS) yang diinisiasi Bank Jateng Sragen lewat aplikasi Sisten Keuangan Desa (Siskeudes). Dia menjelaskan pada triwulan pertama 2021 saja ada peningkatan sampai 20% dari PBB karena sistem CMS efektif. “Mestinya masyarakat tidak perlu menunggu surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) sudah langsung datang ke bank untuk bayar pajak cukup dengan membawa nomor pokok pajak itu. Yang perlu justru *review* atas objek pajaknya. Dulu rumah gedek, jalan jelek, pajaknya sedikit, wajar. Sekarang jalan halus, rumah bagus, masa pajaknya masih sama. Rumah di Jl. Ahmad Yani masa hanya Rp25.000 per tahun? Rumah Pak Sekda juga hanya Rp60.000/tahun. Nilai objek pajak inilah yang harus ditinjau kembali,” jelasnya.